

## **BAB IV**

### **KEBIJAKAN POLITIK LUAR NEGERI AUSTRALIA TERHADAP INDONESIA PADA MASA MALCOLM FRASER**

#### **A. Kebijakan Politik Malcolm Fraser Terhadap Indonesia**

Malcolm Fraser menjadi Perdana Menteri Australia menggantikan Gough Whitlam yang dipecat oleh Gubernur Jenderal Sir Jhon Kerr pada bulan November 1975.<sup>1</sup> Pola politik luar negeri Malcolm Fraser terhadap Indonesia banyak dipengaruhi oleh perubahan-perubahan yang terjadi pada tata perimbangan kekuatan di Asia Tenggara, terutama keluarnya Amerika Serikat dari Vietnam yang berlanjut dengan persaingan Amerika Serikat dengan Uni Soviet di Jasiriah Samudera Hindia. Malcolm Fraser banyak menjalin hubungan dengan beberapa Negara kuat seperti Amerika Serikat, RRC, dan Jepang, hal inilah yang membuat Australia kemudian membentuk Pakta untuk mengatasi pengaruh Soviet di kawasan Asia-Pasifik.<sup>2</sup>

Malcolm Fraser lebih percaya dengan kemampuan negara-negara besar tersebut untuk memerangi pengaruh Uni Soviet dari pada kemampuan negara lainnya. Bukti dari kurangnya ketidakpercayaan Malcolm Fraser terhadap kekuatan negara lainnya ini terlihat pada saat dialog Malcolm Fraser dengan Hua Guo Feng, pada bulan Juli 1976, dimana terungkap bukti ketidak

---

<sup>1</sup> Hellen Marry H, *Whitlam Dipecat, Buruh Demonstrasi*. Dalam *Tempo*, 22 November 1975, hlm. 7.

<sup>2</sup> Edib Muslim, Politik Luar Negeri Australia Terhadap Indonesia : dari Whitlam Sampai Hawke” , *Jurnal Ilmu Politik Vol.39 No, 6*, hlm. 83.

percayaan Malcolm Fraser terhadap beberapa Negara ASEAN, terutama Indonesia, Malaysia, dan Singapura.<sup>3</sup>

Malcolm Fraser menganggap rezim-rezim di negara-negara tersebut terlalu labil untuk dapat diandalkan dalam membendung pengaruh Uni Soviet. Untuk maksud membendung pengaruh Uni Soviet, kerjasama regional ASEAN bagi Malcolm Fraser terlalu muda untuk dapat berperan sebagai suatu kekuatan yang mampu mencegah meluasnya pengaruh Uni Soviet.<sup>4</sup>

Sejak Malcolm Fraser berkunjung ke Luar Negeri yakni Cina, Dubes Uni Soviet serta seluruh diplomat Negara-negara sosialis Eropa Timur secara terang-terangan memboikot kunjungan Malcolm Fraser tersebut. Di Jakarta, seorang pejabat tinggi memberikan reaksi: “Usaha merealisir perjanjian kerjasama Australia, Jepang, Amerika Serikat, dan Cina tak akan diterima oleh Indonesia”. Politik pintu terbuka Cina sebagai negara super Power yang juga mengancam Asia Tenggara tidak menyenangkan pihak Indonesia sendiri.<sup>5</sup>

---

<sup>3</sup> *Ibid*, hlm. 84.

<sup>4</sup> *Apa Yang Bisa (Dan Tidak Bisa ) dilakukan Fraser*, dalam *Tempo*, 9 Oktober 1976, hlm. 5

<sup>5</sup> Edib Muslim, *Ibid.*, 85

Di Australia, keberanian langkah istimewa Malcolm Fraser dalam hubungan luar negeri itu mendapatkan penafsiran tersendiri. Seorang komentator politik di Canberra pernah mengatakan “Sebagai Negara berdaulat, sebenarnya baru pada saat Australia dibawah Gough Whitlam Australia memiliki Politik luar negeri sendiri, sebelumnya Australia hanya ikut akan kemauan London dan Washington”. Langkah Malcolm Fraser yang menarik perhatian itu pada umumnya ditafsirkan hanya melanjutkan apa yang telah dimulai oleh Perdana Menteri Gough Whitlam.<sup>6</sup>

Kebijakan dua arah Australia menciptakan dilema politis ketika isu Timor-Timur dibahas di Sidang Umum PBB menanggapi invasi Indonesia. Australia memilih menjunjung tinggi hak rakyat Timor-Timur atas penentuan nasib sendiri, sejalan dengan prinsip-prinsip PBB dan posisi Indonesia sendiri, tetapi berusaha agar acuan kepada Indonesia dihapus dari resolusi tersebut. Usaha ini gagal dan resolusi yang disetujui pada tanggal 12 Desember 1975 menyesalkan intervensi militer Indonesia, dan menyerukan penarikan pasukan Indonesia secepatnya. Hal yang sangat menyebalkan pihak Indonesia, adalah Australia menjadi satu-satunya negara tetangganya yang mendukung resolusi tersebut.

---

<sup>6</sup> *Yang Terakhir Untuk Whitlam*, dalam *Tempo*, 17 Desember 1977, hlm. 12.

Australia terus mengakui hak Timor-Timur atas penentuan nasib sendiri, dan menunjukkan ketidaksetujuannya terhadap cara Indonesia menggabungkan wilayah Timor-Timur. Australia menolak undangan Indonesia untuk menghadiri Majelis Permusyawaratan Rakyat di Dili pada tanggal 31 Mei 1976, dan tidak mengakui majelis tersebut sebagai tindakan sah dalam penentuan nasib sendiri. Kebijakan ini terus dipegang selama konflik berlangsung.

Salah satu faktor yang ikut membentuk kebijaksanaan luar negeri Malcolm Fraser adalah semakin bertambahnya kapal perang Uni Soviet yang berlayar di antara Lautan Hindia dan Pasifik. Akan tetapi Malcolm Fraser hanya menghitung frekuensi pelayaran, tidak menghitung tonase dan persenjataan kapal-kapal yang berlayar. Berita yang menyebutkan kuatnya posisi Angkatan Laut Soviet di Lautan Hindia, serta kecaman banyak Negara terutama India juga ikut memperbesar kecemasan Malcolm Fraser. Malcolm Fraser mengatakan,<sup>7</sup>

...bahwa kebijaksanaan India bagi kami sampai batas-batas tertentu, masih kurang realis. Mereka nampaknya menganut pandangan-pandangan dan kebijaksanaan tertentu, mereka mengencam Amerika Serikat dalam usaha Negara tersebut membangun pangkalan di Diego Garcia, di Lautan Hindia, yang diperlukan untuk menjaga keseimbangan, tapi mereka membiarkan Uni Soviet membangun kekuatannya di Lautan yang sama.<sup>8</sup>

---

<sup>7</sup> Tempo, 9 Oktober 1976, hlm. 7

<sup>8</sup> *Ibid*,

Sikap India itu jelas mencemaskan Malcolm Fraser, tetapi di Jakarta Indonesia memiliki pendapat yang berbeda, pendapat itu dikatakan didepan wartawan *The Australian Financial Review* pada akhir Agustus 1976, Letnan Jenderal Ali Murtopo menjelaskan sikap Indonesia terhadap kebijaksanaan India, Ali mengatakan, “ Lautan Hindia tidak hanya terbuka untuk negara-negara tertentu, tetapi terbuka untuk semua negara”. Soal ini juga jelas menjadi topik pembicaraan yang menarik yang nantinya Malcolm Fraser akan berkunjung ke Indonesia dan langsung bertemu dengan Soeharto.

Negara-negara ASEAN lainnya juga tentu menantikan hasil pembicaraan tersebut, melihat sikap mereka mengenai Lautan Hindia yang harus jadi daerah bebas. Dalam hal ini sepertinya pihak Australia lebih berkeinginan dalam menjelaskan posisinya, tertuma pada perkataan Malcolm Fraser yang ingin meletakkan ASEAN sebagai salah satu wilayah politik luar negeri Australia, Malcolm Fraser juga bermaksud di bulan Februari tahun 1976 bersama dengan Jepang, Australia pernah secara halus mendesak Jepang juga diundang untuk hadir dalam KTT ASEAN di Bali, akan tetapi Indonesia menolak permintaan tersebut.<sup>9</sup>

---

<sup>9</sup> Edib Muslim,*op.cit.*, hlm. 84.

Besarnya keraguan Malcolm Fraser terhadap kemampuan Negara-negara Asia Tenggara nonkomunis tersebut, namun Malcolm Fraser tidak dapat melepaskan diri dari kenyataan, bahwa Australia harus mengikuti arus kepentingan sahabat besarnya, Amerika Serikat, terutama dalam masalah Indonesia.<sup>10</sup> Adanya AS ini dapat membuat pengaruh politik luar negeri Malcolm Fraser kepada Indonesia, kekhawatiran Malcolm Fraser terhadap ancaman Soviet ini tidak mempengaruhi usaha Fraser dalam menjalin hubungan baik dengan Indonesia.

Sejak Malcolm Fraser terpilih sebagai Perdana Menteri di akhir 1975, kaum buruh dengan serikatnya beberapa kali melansir pemogokan yang hampir saja melumpuhkan dunia industri dan komunikasi di benua selatan itu. Biarpun partai koalisi berhasil menguasai 91 kursi dari 127 kursi di Majelis Rendah dalam pemilu 1975, kaum buruh yang berpolitik ini cukup membuat pusing Malcolm Fraser. Malcolm Fraser berhasil menurunkan angka inflasi dari 15,7 menjadi 10,1%. tetapi semua itu tidak membuat tenangnya keadaan, ditambah jumlah pengangguran berkisar 3.8% (sekitar 322.000 orang)

---

<sup>10</sup> Dalam membendung pengaruh Uni Soviet Fraser tidak terlalu percaya kepada Negara-negara ASEAN termasuk Indonesia, Malaysia, dan juga Singapura, Fraser lebih percaya dan bergantung pada Negara-negara maju seperti Cina, akan tetapi kehadiran AS dalam masalah ini membuat Fraser tetap harus menjalin hubungan dengan Indonesia. *Ibid.*, hlm. 89.

Malcolm Fraser merasa perlu minta dukungan juga dari rakyat Australia, apakah dia diwajibkan memerintah lagi atau tidak.

Malcolm Fraser berharap akan menyelenggarakan pemilu pada Mei tahun depan. Tapi, awal tahun mendatang waktunya kurang menguntungkan baginya, dikarenakan di bulan Januari nanti, banyak jumlah orang-orang yang tamat sekolah, hal ini akan memperbesar kembali jumlah pengangguran, dan Juga angka inflasi di tahun 1977 tampak kurang baik dan lebih menyolok ketimbang angka inflasi di bulan September, akhir kwartal ketiga.<sup>11</sup>

Bulan Oktober tahun 1977, Malcolm Fraser pun mencanangkan kembali pemilu yang jatuh di bulan Desember tahun 1977. Diadakannya pemilu tersebut membuat pihak oposisi yang dipimpin mantan Perdana Menteri Gough Whitlam ini menentang Malcolm Fraser mengadakan kampanye besar-besaran. Pajak pendapatan minta diringankan, pengangguran sedikit diperkecil dan inflasi ditekan, adalah tema yang sering dikampanyekan semua pihak. Sementara masalah uranium (jadi tidaknya Australia mengekspor barang tambang ini) yang tadinya heboh, tidak disinggung-singgung. Kemenangan Malcolm Fraser kedua kali ini bukannya didapat tanpa tantangan dan pukulan yang menurut pengamat politik adalah yang paling keras dalam sejarah pemilu Australia - dari lawan-lawan politiknya.

---

<sup>11</sup> Chauvel Richard H, *Budaya dan Politik Australia*, Jakarta : Yayasan Obor Indonesia, 1992, hlm. 19.

Pada tanggal 9 Oktober 1976 Perdana Menteri Australia, Malcolm Fraser akan berkunjung ke Indonesia. Perdana Menteri negara tetangga ini bukan yang pertama berkunjung ke Indonesia, lima Perdana Menteri Australia sebelumnya juga pernah berkunjung ke Jakarta dan bertemu muka dengan kepala Negara Indonesia.

Pertemuan Malcolm Fraser dengan Soeharto merupakan pertemuan tingkat tinggi dan yang paling menarik, yang menjadi topik pembicaraan antara Malcolm Fraser dengan tuan rumahnya di Jakarta tidak lain adalah soal Timor-Timur. Meskipun wilayah bekas jajahan Portugis itu sudah secara resmi menjadi propinsi ke 27 Republik Indonesia, akan tetapi Australia tetap masih belum jelas mementukan rezim apa yang untuk diakuinya yang berkuasa di Timor-Timur.<sup>12</sup> Di Jakarta maupun Canberra spekulasi terhadap sikap yang akan diputuskan oleh pemerintahan Perdana Menteri Malcolm Fraser berkisar pada tiga kemungkinan yakni : menolak, mengakui atau mengakui secara berangsur-angsur.

## B. Kerjasama Antara Australia-Indonesia

Hubungan Australia dengan Indonesia sebelum kemerdekaan Timor-Timur juga ditandai dinamika pasang surut. Kebanyakan pasang surut terjadi secara politik. Sebelum Perang Dunia II hubungan antara Australia dan

---

<sup>12</sup> Timor-Timur sudah menjadi propinsi ke 27 Republik Indonesia tetapi Australia masih belum tahu rezim atau partai apa yang akan menjadi pemimpin di wilayah Timor-Timur tersebut. Soekanto, *Integrasi : Kebulatan Tekad Rakyat Timor-Timur*, Jakarta : Yayasan Parikesit, 1976, hlm. 48.

Hindia Belanda (nama jajahan untuk Indonesia) bercirikan saling pengabaian dan ketidaktahuan. Akan tetapi, waktu Jepang menyerbu Hindia Belanda dalam PDII Australia mengakui pentingnya Indonesia untuk keamanan Australia.<sup>13</sup>

Akan tetapi suasana kerjasama dipecahkan oleh berberapa peristiwa seperti integrasi Timor Portugis ke dalam Republik Indonesia, Laporan Dunn pada tahun 1983, artikel Jenkins dalam koran *Sydney Morning Herald* pada tahun 1986 dan Insiden Dili pada tahun 1991. Meskipun integrasi Timor Portugis ke dalam Indonesia didukung oleh pemerintah Australia secara resmi, tetapi cara integrasi tersebut dikecam Australia dan banyak orang Australia tidak setuju dengan pendirian pemerintahnya. Australia adalah satu-satunya negara yang mengakui Timor-Timur sebagai propinsi Indonesia secara resmi.<sup>14</sup>

Setiap hubungan antar negara banyak komponen-komponen lain sebuah kerjasama diantaranya kerjasama dalam bidang politik, militer, diplomatik, ekonomik dan sosial-budaya. Sebagian ini difokuskan tiga komponen; politik yang termasuk diplomatik dan militer, ekonomik dan sosial-budaya. Pada umumnya, kebijakan luar negeri Australia dan kebijakan luar negeri Indonesia

---

<sup>13</sup> George Margaret, *Australia dan Revolusi Indonesia*, Jakarta : PT. Pantja Simpati, hlm. 21

<sup>14</sup> Hendro Subroto. *Saksi Mata Perjuangan Integrasi Timor-Timur*. Jakarta : Pustaka Sinar Harapan. 1996, hlm. 32.

memang tidak cocok karena kedua negara ini mempunyai kepentingan, kebutuhan dan ambisi yang berbeda. Misalnya, Australia adalah negara yang sudah maju dan bersekutu dengan AS dan Eropa Barat sedangkan Indonesia adalah negara sedang berkembang dan ‘*non-aligned*’ atau netral dalam Perang Dingin. Hubungan antara Australia dan Indonesia biasanya kurang bersahabat; salahpaham memburuk hubungan terutama dalam hubungan dengan soal Timor Timur.<sup>15</sup>

### 1. Bidang Politik

Pada tahun pertama hubungan politik Australia dengan Indonesia mengalami dilemma. Di satu pihak, terdapat rasa simpatik terhadap perjuangan kemerdekaan Indonesia dan keinginan yang murni untuk memelihara hubungan baik dengan Indonesia. Perkembangan politik dalam negeri Indonesia sedang mengalami tantangan-tantangan baru karena “angin Demokrasi” yang dibawa oleh perkembangan-perkembangan di bagian Negara Eropa Timur.

### 2. Bidang Ekonomi

Hubungan ekonomi antara Australia dan Indonesia lebih sulit untuk diuraikan. Aktivitas ekonomi Indonesia sudah sangat terbatas sebagian akibat Krismon dan instabilitas internal. Akan tetapi, sebelum peristiwa Timor Timur Australia membantu Indonesia secara ekonomi, mencoba

---

<sup>15</sup> Kantor Penerangan Kedutaan Besar Australia, *Ikhtisar Hubungan Australia-Indonesia*, Kedutaan Besar Australia, Jakarta, hlm. 8.

mempengaruhi *International Monetary Fund* (IMF) dan AS untuk mengurangi keketatan syarat program-programnya. Pada saat kemerdekaan Timor-Timur, Australia, serta AS, memanfaatkan IMF untuk memaksa Indonesia untuk membolehkan masuknya pasukan multinasional. Terlepas dari itu, bantuan ekonomi dari Australia, khususnya bantuan ekonomi untuk tentara sangat terbatas.<sup>16</sup>

Secara strategis, hubungan Australia-Indonesia sangat penting. Untuk Australia, Indonesia adalah perbatasan terakhir untuk invasi dari utara. Hubungan yang baik antara Australia dan Indonesia penting sekali untuk keamanan dan stabilitas Asia Tenggara. Dari pandangan Indonesia, Australia biasa memainkan peranan besar kalau Indonesia diancam. Sebagai negara termaju dalam wilayah, Australia menjadi sekutu kuat untuk Indonesia, terutama sekali konteks Perang Dingin, dimana sekutu Australia dan AS sangat kuat.<sup>17</sup>

Secara ekonomi, hubungan antara Australia dan Indonesia sangat kurang dekat, ekonomi Indonesia dan ekonomi Australia tidak saling mengimbangi. Lagi pula kedua negara memiliki tingkat perkembangan

---

<sup>16</sup> Nur Azizah. (1992). *Kerjasama Ekonomi Indonesia-Australia*. Jurnal Ilmu Politik, Vol 4, No. 4. hlm. 371.

<sup>17</sup> *Ibid.*, hlm 372.

yang berbeda. Meskipun kesulitan dalam hubungan ekonomi antara Australia dan Indonesia Kedua negara ini memiliki tingkat tinggi ekspor tenaga; Indonesia mengekspor minyak dan minyak gas sedangkan Australia mengekspor batu bara.<sup>18</sup>

Pada mulanya tahun 1980an, hubungan ekonomi diperbaiki. Selama krisis minyak pada tahun 1970an Australia membantu Indonesia, Australia salah satu negara yang bertemu untuk mengatasi masalah ekonomi yang kronis yang dihadapi Indonesia.<sup>19</sup> Perdagangan bilateral dinaikkan selama awal tahun 1980an. Pada tahun 1981 perdagangan bilateral berjumlah A\$775 juta dan pada tahun 1982 perdagangan ditambah sampai A\$932 juta. Pada tahun 1982 kelebihan perdagangan Indonesia dengan Australia ditambah sampai lebih dari pada A\$100 juta. Dalam masa sama, investasi Australia dalam Indonesia berjumlah lebih daripada A\$200 juta.

Selain hubungan perdagangan Australia dan Indonesia memiliki hubungan ekonomi yang lain juga. Indonesia adalah penerima bantuan Australia yang kedua dan terbesar, Papua Nugini adalah penerima terbesar. Banyak bantuan Australia bukan pinjaman tetapi dana bantuan. Ini berarti Indonesia tidak harus membayar kembali. Hal ini

---

<sup>18</sup> *Ibid.*, hlm. 374

<sup>19</sup> Wanandi. J, *Australia-Indonesia Relations in the Context of Developments in Asia-Pacific*. Jakarta : CSIS. 1984, hlm. 3-9

mencerminkan pentingnya Indonesia untuk Australia, bukan saja di bidang ekonomik juga melainkan bidang politik dan strategi.<sup>20</sup>

### 3. Bidang Sosial-Budaya

Hubungan sosial-budaya juga dipengaruhi peristiwa di Timor Timur. Peringatan perjalanan tetap berjalan dan ada orang di Australia dan Indonesia yang tidak menyukai orang dari negara lain. Meskipun peringatan perjalanan, wisatawan Australia masih tetap ada yang berliburan di Bali. Pertukaran pelajar juga tetap berjalan terus, meskipun pada saat itu ada pertukaran yang dibatalkan, Akan tetapi mahasiswa Australia yang belajar di Indonesia dikurangi sedangkan mahasiswa Indonesia di Australia bertambah. Perbedaan sebagian disebabkan karena perhatian Asia di Australia sangat besar, sehingga bahasa dan pelajaran Asia dikurangi.

Pada saat setelah diumumkannya kemerdekaan Timor-Timur tahun 1975 hubungan sosial-budaya antara Australia-Indonesia semakin memburuk. Kedua negara mengalami demonstrasi besar-besaran Demo-demo yang terjadi di Jakarta memiliki perasaan anti-Australia yang kuat sekali. Demo-demo yang sama terjadi di ibu kota Australia juga. kesalahpahaman, kecurigaan dan prasangka yang sudah lama tidak

---

<sup>20</sup> Kedutaan Besar Australia, *op.cit.*, hlm. 6.

diucapkan, kini ditimbulkan dalam peranan Australia dan peranan Indonesia di Timor Timur.

Hal ini digelorakan lagi oleh pers dan media massa di kedua Negara, Australia dan Indonesia, Jarang ada siaran berita yang netral mengenai keduanya, Memang pada saat itu keadaan di Timor-Timur buruk sekali, tetapi banyak wartawan Australia tidak menganggap peranan Australia dalam proses integrasi dan setelah integrasi. Peranan Australia di Timor Timur tidak mewakili maksudnya untuk mencampuri dalam isu-isu Indonesia yang lain. Australia juga mengalami tekanan dari PBB dan AS untuk mencampuri di Timor Timur. Media massa memiliki pengaruh dalam terhadap persepsi-persepsi masyarakat baik di Australia maupun Indonesia.<sup>21</sup>

Pers juga memainkan peranan besar di hubungan sosial-budaya. Siaran berita memperkuat prasangka dan kecurigaan. Australia digambarkan sebagai tetangga yang kaya, sombong dan suka mencampuri. Dibandingkan Indonesia, Indonesia digambarkan penggertak yang kejam, keras dan melanggar HAM. Pada umumnya Indonesia digambarkan sebagai tidak beradab, Walaupun hubungan sosial-budaya sedikit berganti. Hubungan masih bergantung pada pengalaman dan ambisi pribadi.

---

<sup>21</sup> Agustinus, "Masalah Timor-Timur dan Politik Luar Negeri RI" Tersedia pada <http://www.JurnalPhobia.Com>. Diakses pada tanggal 24 Desember 2011, Pukul 19.00.

Misalnya, universitas Indonesia masih mengirimkan dosen bahasa Inggris ke Australia untuk belajar.<sup>22</sup>

Pada saat kemerdekaan Timor-Timur semua hubungan antara Australia dan Indonesia, baik hubungan politik, ekonomi dan sosial-budaya ini diperburuk. Kekurangan kepercayaan dan kekurangan ideologi, sejarah, budaya dan ras yang bersama berarti tidak ada dasar untuk hubungan didirikan lagi.

Dalam bidang budaya (termasuk media massa) telah dibentuk Yayasan Australia untuk Indonesia hal ini untuk membantu usaha-usaha dibidang budaya dan media massa khususnya. Dibidang media inipun para wartawan Australia yang ingin sekali mengenal Indonesia tanpa diundang berkunjung dan melihat langsung pembangunan-pembangunan daerah disamping meliputi politik di Jakarta.

---

<sup>22</sup> Devania Annesya, "Sejarah Hubungan Australia-Indonesia" tersedia pada <http://www.BlogatWordPress.com>, diakses pada tanggal 23 Desember 2011, pukul 10.00.

#### 4. Bidang Pendidikan

Australia memperkenalkan pelajaran bahasa Indonesia yang diperkenalkan pada sekolah menengah atas. Selain itu Australia memiliki studi, studi yang mantap dan bergaya tentang Asia Tenggara di berbagai perguruan tinggi seperti: Monash University di Melbourne. Australia menjadi tujuan belajar nomor dua terpenting bagi Indonesia setelah Amerika Serikat.

Universitas Monash di Melbourne dan Universitas Sydney telah memperkenalkan pelajaran tentang music tradisi Indonesia pada bagian music masing-masing. Monash memiliki gamelan dan seorang guru gamelan yang terkemuka di Bali yang membantu para mahasiswa untuk belajar, sedangkan di Universitas Sydney memiliki seorang ahli music dari Bandung yang bekerja dengan bagian Musik dalam penyelidikan dan program studi music Sunda.<sup>23</sup>

Pelajaran-pelajaran Indonesia pada umumnya mempunyai status yang tinggi di Universitas-Universitas besar di Australia baik pada tingkat prasarjana maupun Sarjana. Sejumlah proyek sudah dimulai untuk membantu orang-orang Australia mempelajari lebih dalam lagi tentang Indonesia. Museum Australia di Sydney sedang dipersiapkan suatu pameran tentang

---

<sup>23</sup> *Ibid*, hlm. 24

kehidupan mutakhir di Indonesia yang akan diadakan di Sydney pada tahun 1975.<sup>24</sup>

Rasa saling memahami dan saling menerima perbedaan-perbedaan nilai-nilai budaya ini hanya dapat tercapai melalui pendidikan dan media massa, karena itu pendidikan tentang Australia dan Indonesia sangat penting untuk masa depan dalam waktu jangka panjang. Studi tentang Australia dan Indonesia harus diperhatikan oleh kedua negara ini secara terus menerus.<sup>25</sup>

Adanya minat dari studi antar keduanya ini sangat erat hubungannya dengan pekerjaan yang akan diperoleh lulusan studi tersebut, sehingga hubungan ekonomi dan kesempatan kerja di Indonesia maupun Australia sangat penting agar dapat menarik calon-calon yang baik untuk memperdalam pengetahuan mereka tentang negara tetngganya. Selain itu izin-izin studi dan penelitian di Indonesia harus dipermudah agar dapat menarik minat para ahli dan calon-calon ahli Australia bekerja di Indonesia. Studi-studi seperti itu merupakan syarat penting untuk meningkatkan hubungan antara Australia dan Indonesia dimasa mendatang.

---

<sup>24</sup> Susan Critchley, *Hubungan Australia dengan Indonesia : Faktor Geografi, Politik dan Strategi Keamanan*, Jakarta : UI Press, 1995, hlm. 28.

<sup>25</sup> *Ibid*, hlm. 42.

Banyak yang tertarik dan berniat mempelajari negara-negara dan masyarakat yang secara langsung berdekatan dengan Australia tetapi yang situasinya begitu berbeda, karena itu ada perhatian besar pada penelitian tentang bagian-bagian Asia Tenggara, bahkan pelajaran tentang bahasa-bahasa Asia, termasuk bahasa Indonesia banyak diikuti orang-orang dari Negara-negara lain termasuk halnya Australia. Banyak yang mempelajarinya semenjak mereka duduk dibangku Sekolah-sekolah dasar dan mengah.

##### 5. Bidang Militer

Masalah keamanan bukan hanya soal pertahanan atau Militer saja tetapi dalam kawasan Asia Tenggara dan Asia Pasifik ini kerjasama dapat dilakukan mengenai seluruh kehidupan bangsa dan Negara dan termasuk pula bidang-bidang ekonomi, politik, pendidikan, dan social budaya seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya. Begitu pula halnya dengan masalah hubungan keamanan antara Australia dengan Indonesia itu harus didasarkan atas hubungan yang kokoh.<sup>26</sup>

Dilihat dari Peranan politik ABRI dalam perkembangan Indonesia itu sangat penting, maka masalah perkembangan peran, strategi, susunan dan personalia pimpinan ABRI juga penting bagi hubungan Australia dan

---

<sup>26</sup> Jusuf Wanandi. (1992). “Kerjasama Keamanan Australia-Indonesia”, *Analisis CSIS*, Vol. 21 No, 5, hlm. 425

Indonesia, karena itu dalam kerjasama militer antar kedua Negara dibidang keamanan peran politik ABRI mempunyai arti penting tersendiri.<sup>27</sup>

Kerjasama ini untuk masa depan mungkin akan sangat penting, karena perubahan-perubahan di kawasan mungkin cukup besar dimana negara-negara kecil dan menengah harus bekerjasama untuk mengatasi multipolarity yang akan menimbulkan ketidakpastian baru dan dapat mengganggu keamanan dan kestabilan kawasan Asia Tenggara. Hal itu berarti bukan saja kerjasama militer antara Australia dan ASEAN, tetapi mungkin dapat juga kerjasama antara ASEAN dan Australia.

### **C. Dampak Hubungan Australia-Indonesia**

Kerjasama antara Australia dan Indonesia dalam berbagai bidang ternyata tidak membuat hubungan Australia dengan Indonesia baik-baik saja tetapi dapat menimbulkan dampak, baik itu dampak positif maupun dampak negatif.

#### a. Dampak Positif

1. Indonesia adalah negara penerima bantuan nomor dua dari pihak Australia. penerima bantuan ini adalah Papua Nugini dalam bentuk bantuan proyek, bantuan pangan dan program latihan. Selain itu di Papua New Guinea, Australia juga membangun proyek, Antara lain pembangunan jaringan jalan di Kalimantan Barat, proyek irigasi Gimanuk, lembaga penelitian peternakan, penyediaan air bersih,

---

<sup>27</sup> *Ibid.*

pengembangan perawatan intensif di RSUP Cipto Mangunkusumo di Jakarta. Proyek ini dibedakan menjadi 28 macam.

2. Indonesia mendapat grant atau pemberian hadiah, jadi bukan pinjaman yang harus dibayar kembali oleh Indonesia.
3. Australia-Indonesia bekerjasama dalam pertahanan (*Defence Cooperation*), dalam rangka Indonesia mendapat bantuan 25 juta dolar Australia untuk masa 3 tahun
4. Penduduk Indonesia 140 juta jiwa, Indonesia bukanlah sekedar tetangga langsung Australia melainkan negara terbesar dalam ASEAN. Australia menyelenggarakan kerjasama dengan ASEAN, maka Australia perlu menjaga hubungan baik dengan Indonesia jika hendak bekerjasama dengan ASEAN.
5. Australia satu-satunya negara selain Indonesia yang mengajarkan bahasa Indonesia di sekolah-sekolah sebagai contoh pengajaran yang diberikan di New South Wales, dan juga di universitas Monash di Melbourne. Secara garis besar dampak positif dari hubungan kedua negara adalah keamanan dan kepentingan masing-masing negara terjamin, karena hubungan keduanya baik.

b. Dampak negatif

Australia selalu ikut campur tangan dalam berbagai masalah dalam negeri di Indonesia seperti halnya masalah Timor-Timur pada saat Timor-Timur diintegrasikan ke dalam negara Republik Indonesia, Australia menentang kuat. Mereka menuntut agar hak menentukan nasib sendiri diberlakukan bagi masyarakat Timor-Timur, menurut mereka Timor-Timur merupakan suatu bangsa tersendiri dan secara ras berbeda dengan Indonesia.<sup>28</sup>

Hubungan militer lebih sulit untuk diperbaiki, Hubungan militer, termasuk aspek politik dan aspek sosial. Persetujuan politik bisa menyebabkan tentara-tentara berkerjasama, akan tetapi hubungan ini berdasar kepercayaan. Sebelum kemerdekaan Timor-Timur, mereka sudah lama bekerjasama. Pada saat kemerdekaan, kepercayaan yang dibangun dihancurkan, dengan maksud untuk memperbaiki hubungan militer kepercayaan harus kembali dulu.

---

<sup>28</sup> Hadi Soesastro, “Dampak-dampak dari hubungan kerjasama Australia-Indonesia” tersedia pada <http://www.BlogatWordPress.com>, diakses pada tanggal 23 November 2011, pukul 10.00.